



**TAHUN
2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN
GROBOGAN**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)**

**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GROBOGAN
Jl. P. Diponegoro No. 20 Purwodadi**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERTANIAN

Jalan P. Diponegoro Nomor 20, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah Kode Pos 58114,
Telepon (0292) 421478 Faksimile (0292)-426322,
Laman : www.dinpertan.grobogan.go.id, Posel : dinpertan@grobogan.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERTANIAN KAB.GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, Pebruari 2026



**RI. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GROBOGAN**

KUKUH PRASETYO RUSADY.S.H..M.M

Pembina

NIP. 198606132010011012



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pertanian merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat



mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Purwodadi, Pebruari 2026

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN

KABUPATEN GROBOGAN



KUKUH PRASETYO RUSADY, S.H., M.M

Pembina

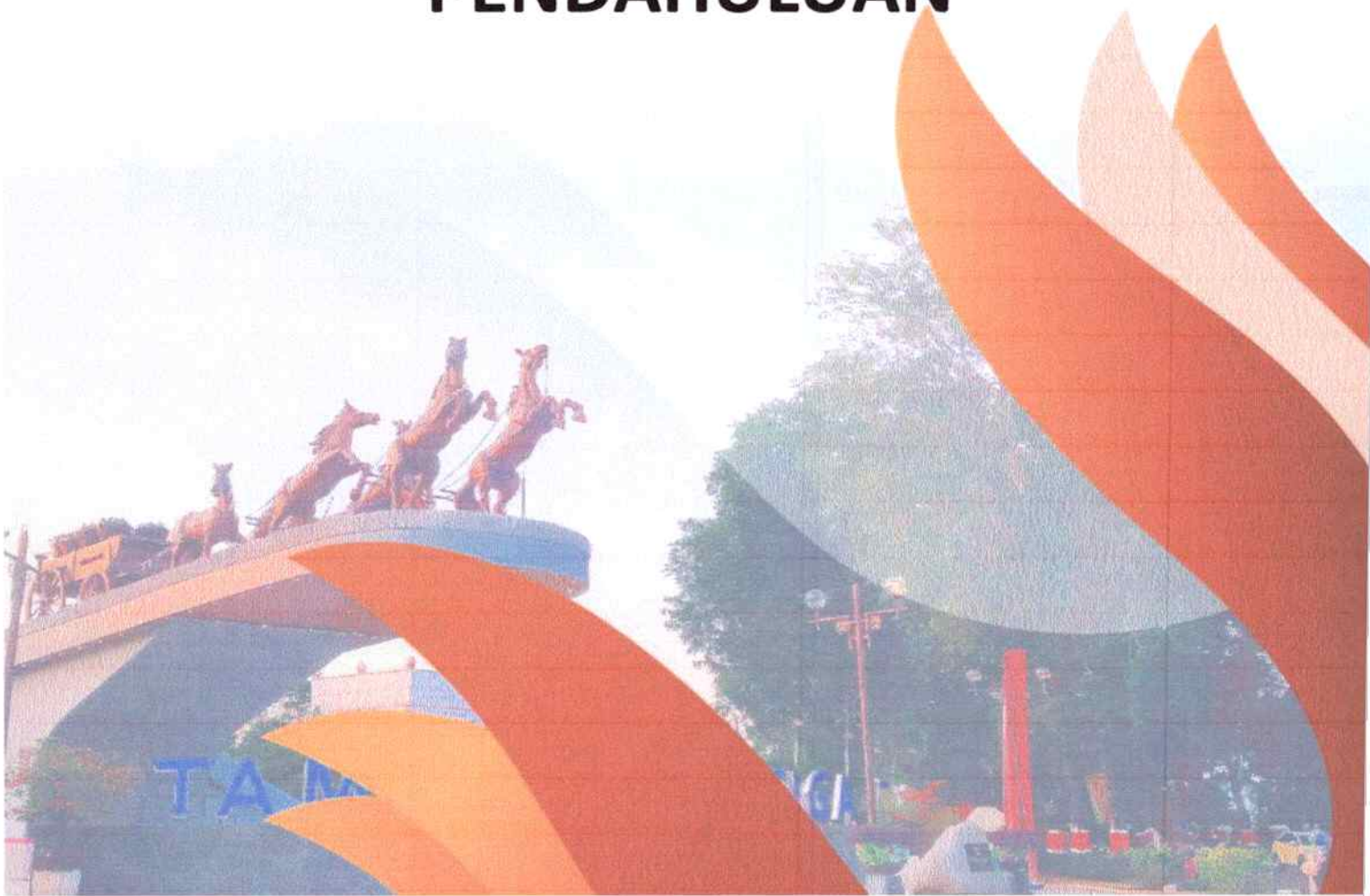
NIP. 1986061320210011012



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	8
D. Landasan Hukum	10
E. Sistematika	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Pengukuran Kinerja	24
B. Capaian Kinerja Organisasi	26
1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2025	27
2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.	28
3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra	31
4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten sekitar	33
5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan	33
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	45
C. Realisasi Anggaran	67
BAB IV PENUTUP	71
LAMPIRAN	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pertanian selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung



secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan No. 76 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuannya di bidang pertanian yaitu merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, melaksanakan bimbingan dan pembinaan, pengelolaan administrasi, ketatausahaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian.

1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya dan fungsinya tersebut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut:



- a. merumuskan konsep kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
- b. merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- c. mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
- e. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. menetapkan kebijakan dan standar operasional di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang didelegasikan;
- h. menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. menyelenggarakan pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. menyelenggarakan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;





- l. menyelenggarakan pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- m. menyelenggarakan pembinaan produksi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- n. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- o. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan bencana alam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- p. menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- q. menyelenggarakan penyuluhan pertanian;
- r. menetapkan izin usaha/rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- s. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- t. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- u. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dituangkan dalam susunan organisasi yang mampu menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Susunan Organisasi beserta uraian tata kerja yang komprehensif menggambarkan wewenang dan tanggung jawab setiap unsur organisasi tentang pengendalian dan interaksi antara pimpinan dan bawahan serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin





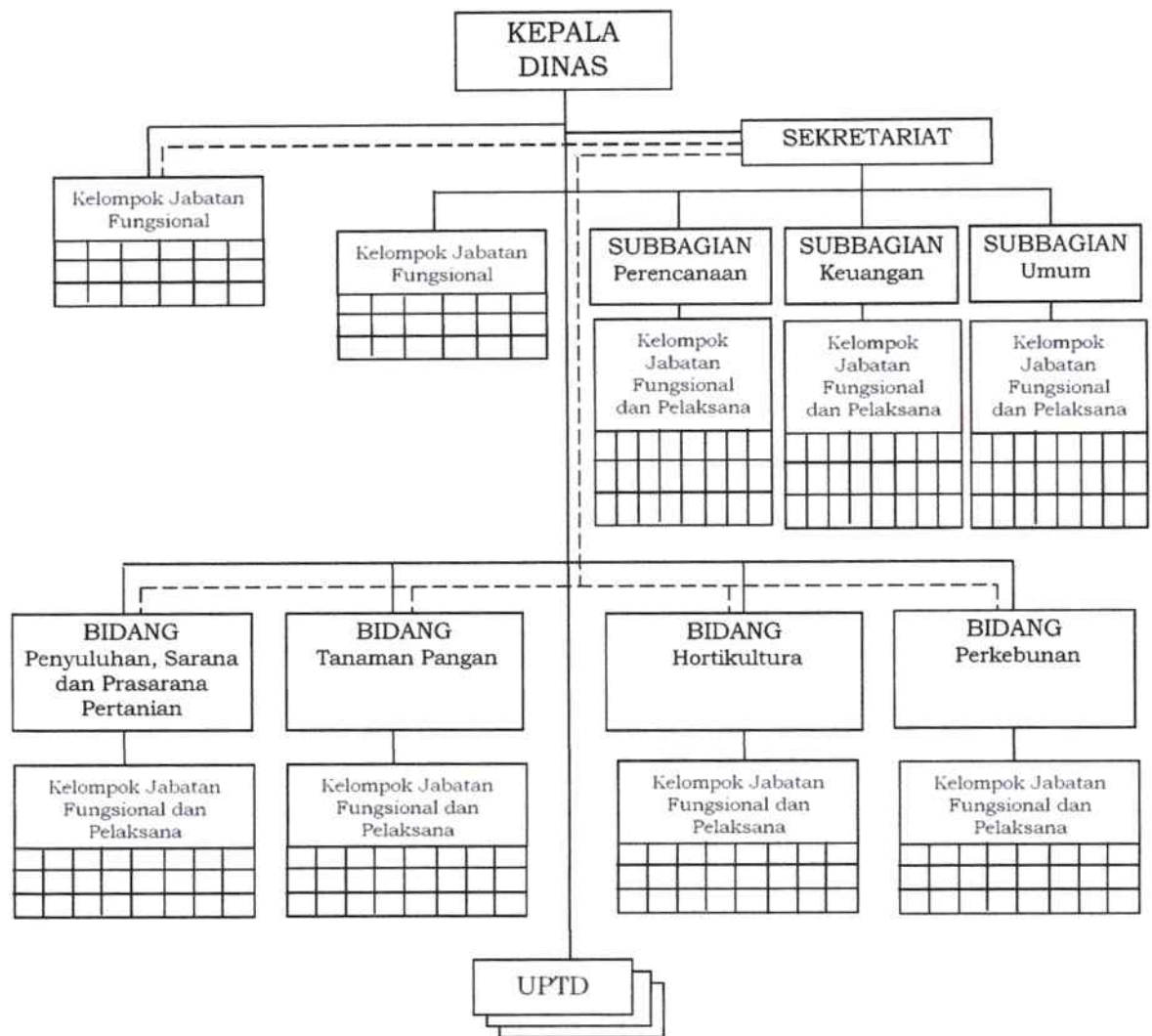
kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan membentuk susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian;
- d. Bidang Tanaman Pangan;
- e. Bidang Hortikultura;
- f. Bidang Perkebunan;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Adapun struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tercantum dalam gambar 1.1.



Gambar 1.1.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN





C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pertanian periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Belum optimalnya indeks pertanaman dan luas tambah tanam;
3. Belum optimalnya manajemen dan kelembagaan usaha tani;
4. Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air, serta dampak perubahan iklim;
5. Belum optimalnya prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan;
6. Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber air untuk kebutuhan pertanian;
7. Kurangnya jumlah penangkar dan produsen benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
8. Semakin kurangnya sumber daya manusia petani pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan generasi muda kurang tertarik mengembangkan usaha di bidang pertanian;
9. Masih kurangnya penerapan modernisasi pertanian sebagai sarana untuk mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
10. Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian dan perkebunan
11. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi pasar;
12. Masih rendahnya perlindungan terhadap petani.





Visi

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029 disebutkan bahwa pembangunan Kabupaten Grobogan diarahkan pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Visi:

"Terwujudnya Grobogan yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan"

Dimana Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian berupaya mewujudkan visi tersebut melalui Program dan Kegiatan.

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan menetapkan misi-misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Membangun infrastruktur sesuai dengan potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan resiko bencana;
3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing;
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Pertanian periode 2025-2029, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 Berdasarkan uraian visi dan misi di atas, maka Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menjadi berperan pada misi ke 3 (tiga) yang mengarah pada bidang pertanian, yaitu Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing.



D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pertanian ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan 2025-2029;
5. Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan No. 76 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025 adalah:

- | | |
|----------------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |





BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)





tahun. Di dalam Renja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Grobogan yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
- Misi 2 : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana
- Misi 3 : Memperkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 4 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat
- Misi 5 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menjadi berperan pada misi ke 3 (tiga) yang mengarah pada bidang pertanian, yaitu Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 sebanyak 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2025	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi	1	Meningkatnya indeks pertanaman (IP)	270	270,5	271	271,5	272
		2	Meningkatnya luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan	245.139	250.121	255.227	260.461	265.817



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2025	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	hortikultura dan perkebunan	perkebunan					
	Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)	3 Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian	Prosentase pertumbuhan kelompok tani naik kelas	2	2	2	2	2

Sumber: Renstra Dinas Pertanian periode 2025-2029

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Tujuan : 1. Meningkatkan Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi
 Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah

2. Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP)	1.1. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	Indeks	Indeks Pertanaman adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 tahun	$\frac{\text{Perhitungan luas tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam 1 tahun}}{\text{luas baku sawah}}$	BPS, Data Statistik Pertanian
2	Meningkatnya Luas Tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2.1 Luas Tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ha	Perhitungan luas tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam 1 tahun	Perhitungan luas tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam 1 tahun	BPS, Data Statistik Pertanian





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian	3.1	Persentase Pertumbuhan kelompok tani yang naik kelas	Persen (%)	Kelompok tani terdiri dari 4 (empat) kategori yang terdiri dari: kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya dan kelas utama $\frac{\text{Jumlah kelompok tani naik kelas Tahun } n - \text{Jumlah Kelompok tani yang naik kelas tahun } n-1}{\text{kelompok tani yang naik}} \times 100 \%$	BPS, Data Statistik Pertanian

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2025



B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025:

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	1. Meningkatnya indeks pertanaman (IP)	Peningkatan indeks pertanaman (IP)	Indeks	273
2.	Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)	2. Meningkatnya luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan	Luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan	Ha	352.735
		3. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian	Prosentase pertumbuhan kelompok tani naik kelas	Persen (%)	2,12

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2025



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	1. Meningkatkan indeks pertanaman (IP)	Peningkatan indeks pertanaman (IP)	Indeks	273
		2. Meningkatkan luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan	Luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan	Ha	352.735



2.	Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)	3.	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian	Prosentase pertumbuhan kelompok tani naik kelas	Persen (%)	2,12
----	---------------------------------------	----	---	---	------------	------

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pertanian:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	17.655.450.000
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%	220.100.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	13.318.748.000
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	64.000.000
4	Kegiatan Administrasi	Persentase pemenuhan	100%	1.720.998.600



NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	170.000.000
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	1.211.000.000
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	950.603.400
II.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pertumbuhan luas penggunaan dan pemanfaatan sarana pertanian	9,68%	5.481.620.000
1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	1 Laporan	4.826.620.000
2	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan	Prosentase penggunaan benih bersertifikat untuk komoditas utama	70 %	655.000.000





NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Kabupaten/Kota			
III.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pertumbuhan pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian	7,02%	17.133.661.500
1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan pengembangan prasarana pertanian	1 Laporan	834.996.000
2	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	43 Unit	16.298.665.500
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	31 Unit	
		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	21 Unit	
IV.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase peningkatan luas pengendalian OPT	8,79%	2.847.639.500
		Prosentase peningkatan lahan yang diasuransikan	22,43%	
1	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	luas lahan yang diasuransikan	1500 ha	2.847.639.500
		luas pengendalian OPT	7018 ha	
V.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani naik kelas	2,12%	5.917.513.000





NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kenaikan kelas kelompok tani	32 Kelompok	5.917.513.000
				49.035.884.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara



penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah (negatif), maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dimaksud.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:



1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pertanian Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Meningkatnya indeks pertanaman (IP)	Peningkatan indeks pertanaman (IP)	273	273,1	100.04	Sangat tinggi	Data statistik Pertanian
		Meningkatnya luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan	Luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan	352.735 Ha	353.140 Ha	100.11	Sangat tinggi	Data statistik Pertanian
		Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian	Prosentase pertumbuhan kelompok tani naik kelas	2,12 %	2,12%	100	Sangat tinggi	Data statistik Pertanian
2.	Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)			112,98	114,35	101,21	Sangat tinggi	



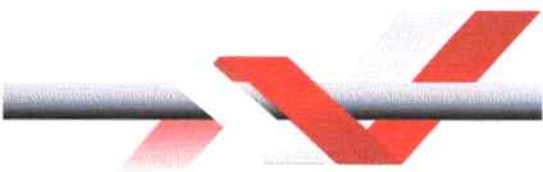
Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian adalah Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP), Meningkatnya Luas Tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian. Secara umum, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dapat mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Dari tabel di atas dapat dilihat, realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Meningkatnya indeks pertanaman (IP) sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 273.1 dari target 273 (100.04 %). Indikator Kinerja Utama Meningkatnya luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan untuk tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 353.140 Ha dari target 352.735 Ha (100.11%). Indikator Kinerja Utama Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian, sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 2,12% dari target 2,12% (100 %).

2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja







No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Pertumbuhan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1,7	1,98	116%	1,7 %	3,37	198,2	3,37	3,51	104,2%	3,51	3,53	100,57
	Meningkatnya indeks pertanaman (IP)	Peningkatan indeks pertanaman (IP)	270	272	100.7	270,5	272,5	100.7	272,5	273	100.2	273	273,1	100,04
	Meningkatnya luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan	Luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan	245.139 Ha	311,395 Ha	127 %	250,121 Ha	341.429 Ha	136,5%	341.429 Ha	352.735 Ha	103,3%	352.735 Ha	353.140 Ha	100,11
	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian	Prosentase pertumbuhan kelompok tani naik kelas	2 %	2%	100%	2%	2,12%	106%	2,12%	2,12%	100%	2,12%	2,12%	100,00
2.	Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani	-	-	-	101,66	106,73	104	106,73	112,98	105,8%	112,98	114,35	101,21



Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian indikator tujuan Meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah tahun sebelumnya menunjukkan tren naik (positif) yang dibuktikan adanya kenaikan realisasi kinerja dari tahun sebelumnya, tahun 2022 realisasi sebesar 1,98 dari target 1,7(116%), di tahun 2023 realisasi 3,37 dari target 1,7 (198,2%) dan tahun 2024 realisasi sebesar 3,51 dari target 3,37 (104,2%) untuk tahun 2025 realisasi sebesar 3,53 dari target 3,51 (100.57%). Selanjutnya untuk sasaran Peningkatan indeks pertanaman (IP) dan Luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan Perkebunan mengalami kenaikan dari tahun 2022 sampai 2025, sedangkan untuk sasaran Prosentase pertumbuhan kelompok tani naik kelas dari tahun 2022 100%, di tahun 2024 dan 2025 cenderung stagnan yaitu 2,12%.

Sedangkan capaian indikator tujuan Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) diasumsikan mengalami kenaikan dari tahun 2023 mencapai 104%, tahun 2025 untuk tahun 2025 realisasi sebesar 113,02 dari target 114,35 (101,21%).

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan	Pertumbuhan produksi komoditas	3,53%	1,7%	207,65



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	perkebunan sebagai wujud kontribusi pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan			
	Meningkatnya indeks pertanaman (IP)	Peningkatan indeks pertanaman (IP)	273,1	272	100,40
	Meningkatnya luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan	Luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan	353.140 Ha	265.817 Ha	132,85
	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian	Prosentase pertumbuhan kelompok tani naik kelas	2,12%	2%	106,00
2.	Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani	114,35	102,61	111,44

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, realisasi capaian target dan tujuan Dinas Pertanian adalah Meningkatkan Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah. Indikator dari tujuan rencana strategis Dinas Pertanian adalah pertumbuhan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan nilai tukar petani. Capaian kinerja indikator pertumbuhan produksi komoditas tanaman

pangan, hortikultura dan perkebunan dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,7 % dengan realisasi 3,53% (207,65% dari target) artinya kinerja sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan. Nilai tukar petani (NTP) di tahun 2025 sebesar 114,35 (111,44%) dari target akhir 2026 sebesar 102,61.

4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Provinsi Jawa Tengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Provinsi Jawa Tengah	% Capaian
1	2	3	4	5	$6 = \frac{4}{5} \times 100$
1.	Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani	114,35	117,57	97,26

Dari tabel di atas, capain kinerja Tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian provinsi, diasumsikan capaian kinerja kabupaten masih dibawah sama dengan capaian kinerja provinsi Jawa Tengah dengan persentase 97,26% untuk Nilai Tukar Petani (NTP).

5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:





Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

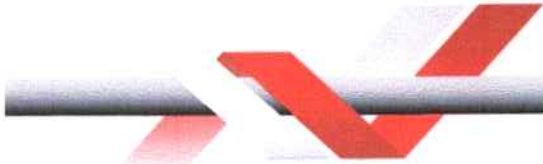
N O	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Tujuan : Meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah.	Pertumbuhan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	3,51	3,53	100,57		
	Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani	112,98	114,35	101,21		
	Sasaran : 1.Meningkatnya indeks pertanaman (IP)	Peningkatan indeks pertanaman (IP)	273	273,1	100,04		
	2.Meningkatnya luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan	Luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan	352.735 Ha	353.140 Ha	100,11		





N O	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	3.Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian	Prosentase pertumbuhan kelompok tani naik kelas	2,12%	2,12%	100		
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pertumbuhan luas penggunaan dan pemanfaatan sarana pertanian	9,68	10,53	108,77		
A.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	1	1	100		
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	1	100		
B	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	1	100		





N O	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase penggunaan benih bersertifikat untuk komoditas utama	70	70	100		
2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan SDG Hewan/Tanaman	1	1	100		
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian	7,02	7,58	108		
A.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan pengembangan prasarana pertanian	1	1	100		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	1	1	100		
B	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	21	43	100		





N O	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	43	31	100		
		Jumlah Prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	31	21	100		
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	43	43	100		
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	31	31	100		
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	21	21	100		
III	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase peningkatan luas lahan yang diasuransikan	22,43	23,03	102,69		
		Prosentase peningkatan luas pengendalian OPT	8,79	8,98	102,11		





N O	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
A.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	luas lahan yang diasuransikan	1.500	1439,74	95,98	Untuk kuota Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sudah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementan, jadi diluar kuota yang ditentukan petani tidak bisa mendaftar AUTP	
		luas pengendalian OPT	7.018	7.702	109,75		
1	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	100	100	100		
IV	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani naik kelas	2,12	2,12	100		
A.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kenaikan kelas kelompok tani	32	32	100		





N O	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	19	19	100		
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	19	19	100		
3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	19	19	100		
4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	20	20	100		
5	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	118	118	100		





N O	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
6	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	3	3	100		
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100	100	100		
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100	100	100		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	100		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	1	100		





N O	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	100		
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	100		
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	100	100		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	133	133	100		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	5	5	100		





N O	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	100	100		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	403	403	100		
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7	7	100		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	1	100		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	3	100		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang	4	4	100		





N O	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		disediakan					
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4	4	100		
6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	3	3	100		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100		
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100		
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32	32	100		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	12	12	100		





N O	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	1	100		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100		
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	100	100		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	108	108	100		





N O	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya dipelihara	84	84	100		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya direhabilitasi/dipelihara	4	4	100		



6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N O	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	100	17.655.450.000	16.947.029.171	95,99	4,01	17.655.450.000	708.420.829	Efisien
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	220.100.000	215.816.300	98,05	1,95	220.100.000	4.283.700	Efisien
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	100	110.000.000	107.451.500	97,68	2,32	110.000.000	2.548.500	Efisien
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100	24.800.000	23.580.000	95,08	4,92	24.800.000	1.220.000	Efisien
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	100	48.000.000	48.000.000	100,00	0%	48.000.000	0	Impas
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100	37.300.000	36.784.800	98,62	1,38	37.300.000	515.200	Efisien





N O	Tujuan/Sasaran/Progra m/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingk at efisie nsi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Penguranga n dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capai an	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	13.318.748.000	12.731.117.372	95,59	4,41	13.318.748.000	587.630.628	Efisien
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	133	133	100	13.274.268.000	12.686.637.372	95,57	4,43	13.274.268.000	587.630.628	Efisien
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	5	5	100	44.480.000	44.480.000	100,00	0	44.480.000	0	Impas
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	64.000.000	62.791.000	98,11	1,89	64.000.000	1.209.000	Efisien
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	403	403	100	64.000.000	62.791.000	98,11	1,89	64.000.000	1.209.000	Efisien
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	1.720.998.600	1.711.043.230	99,42	0,58	1.720.998.600	9.955.370	Efisien
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	7	7	100	50.000.000	50.000.000	100,00	0,00	50.000.000	0	Impas
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1	100	25.000.000	22.576.000	90,30	9,70	25.000.000	2.424.000	Efisien
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	3	100	557.840.000	557.096.000	99,87	0,13	557.840.000	744.000	Efisien
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4	4	100	88.000.000	87.946.000	99,94	0,06	88.000.000	54.000	Efisien
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	4	100	20.000.000	17.850.000	89,25	10,7 5	20.000.000	2.150.000	Efisien
6	Penyediaan Bahan/Material	3	3	100	164.984.000	160.831.000	97,48	2,52	164.984.000	4.153.000	Efisien





N O	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100	815.174.600	814.744.230	99,95	0,05	815.174.600	430.370	Efisien
G	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	170.000.000	162.717.000	95,72	4,28	170.000.000	7.283.000	Efisien
1	Pengadaan Mebel	32	32	100	49.000.000	48.216.000	98,40	1,60	49.000.000	784.000	Efisien
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	12	100	121.000.000	114.501.000	94,63	5,37	121.000.000	6.499.000	Efisien
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	1.211.000.000	1.124.833.150	92,88	7,12	1.211.000.000	86.166.850	Efisien
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1	1	100	12.000.000	12.000.000	100,00	0,00	12.000.000	-	Impas
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	443.000.000	415.124.600	93,71	6,29	443.000.000	27.875.400	Efisien
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	756.000.000	697.708.550	92,29	7,71	756.000.000	58.291.450	Efisien
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	950.603.400	938.711.119	98,75	1,25	950.603.400	11.892.281	Efisien
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	108	108	100	122.703.400	117.866.619	96,06	3,94	122.703.400	4.836.781	Efisien





N O	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
	Lapangan										
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84	84	100	75.000.000	75.000.000	100,00	0	75.000.000	0	Impas
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	4	100	752.900.000	745.844.500	99,06	0,94	752.900.000	7.055.500	Efisien
TUJUAN RENSTRA: 1. Meningkatkan Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah											
2. Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)											
SASARAN RENSTRA (1): Meningkatnya Luas Tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan											
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	9,68	10,53	108,77	5.481.620.000	4.730.535.653	86,30	13,70	5.481.620.000	751.084.347	Efisien
A.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1	1	100	4.826.620.000	4.081.014.733	84,55	15,45	4.826.620.000	745.605.267	Efisien
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	1	100	2.498.045.000	1.884.828.584	75,45	24,55	2.498.045.000	613.216.416	Efisien
2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	1	100	2.328.575.000	2.196.186.149	94,31	5,69	2.328.575.000	132.388.851	Efisien





N O	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
B	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	70	70	100	655.000.000	649.520.920	99,16	0,84	655.000.000	5.479.080	Efisien
1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	1	100	655.000.000	649.520.920	99,16	0,84	655.000.000	5.479.080	Efisien
SASARAN RENSTRA (2): Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP)											
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7,02	7,58	108	17.133.661.500	17.023.781.739	99,36	0,64	17.133.661.500	109.879.761	Efisien
A.	Pengembangan Prasarana Pertanian	1	1	100	834.996.000	818.733.100	98,05	1,95	834.996.000	16.262.900	Efisien
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	1	1	100	646.346.000	633.388.500	98,00	2,00	646.346.000	12.957.500	Efisien
2	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	1	1	100	188.650.000	185.344.600	98,25	1,75	188.650.000	3.305.400	Efisien
B	Pembangunan Prasarana Pertanian	43	43	100	16.298.665.500	16.205.048.639	99,43	0,57	16.298.665.500	93.616.861	Efisien
		31	31	100					-	-	Efisien





N O	Tujuan/Sasaran/Progra m/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingk at efisie nsi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurang an dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capai an	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
		21	21	100							
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	43	43	100	7.558.074.500	7.530.868.166	99,64	0,36	7.558.074.500	27.206.334	Efisien
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	31	31	100	4.906.714.000	4.856.985.680	98,99	1,01	4.906.714.000	49.728.320	Efisien
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	21	21	100	3.833.877.000	3.817.194.793	99,56	0,44	3.833.877.000	16.682.207	Efisien
IV	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	22,43	23,93	107%	2.847.639.500	2.721.216.515	95,56	4,44	2.847.639.500	126.422.985	Efisien
		8,79	8,88	101,03		-					
A.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1558	1439,74	92,41	2.847.639.500	2.721.216.515	95,56	4,44	2.847.639.500	126.422.985	Efisien
		7018	7702	109,75		-					
1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100	100	100%	2.847.639.500	2.721.216.515	95,56	4,44	2.847.639.500	126.422.985	Efisien
SASARAN RENSTRA (3): Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian											



N O	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
V	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2,12	2,12	100	5.917.513.000	5.561.691.749	93,99	6,01	5.917.513.000	355.821.251	Efisien
A.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	32	32	100	5.917.513.000	5.561.691.749	93,99	6,01	5.917.513.000	355.821.251	Efisien
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	19	19	100	992.150.000	863.898.260	87,07	12,93	992.150.000	128.251.740	Efisien
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	19	19	100	1.233.430.000	1.184.040.624	96,00	4,00	1.233.430.000	49.389.376	Efisien
3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	19	19	100	756.478.000	736.248.315	97,33	2,67	756.478.000	20.229.685	Efisien
4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	20	20	100	1.950.000.000	1.821.730.000	93,42	6,58	1.950.000.000	128.270.000	Efisien
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	118	118	100	538.080.000	515.280.000	95,76	4,24	538.080.000	22.800.000	Efisien
	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	3	3	100	447.375.000	440.494.550	98,46	1,54	447.375.000	6.880.450	Efisien
					49.035.884.000	46.984.254.827	95,82	4,18	49.035.884.000	2.051.629.173	





Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Kegiatan dinilai efisien bila:

- Target output berhasil diwujudkan dengan menggunakan kuantitas input (biaya) yg lebih kecil dari rencananya.
- Kuantitas input tertentu menghasilkan output yg lebih besar dari standar (rencana).
- Input digunakan untuk menghasilkan target output yg direncanakan (tidak terdapat pemborosan sumber daya)

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus: $\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$

Hingga akhir Tahun 2025, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 46.984.254.827,00 dari anggaran Rp 49.035.884.000,00 atau realisasi sebesar 95,82%. Realisasi anggaran sebesar 95,82% maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut, walaupun masih tersisa anggaran sebesar Rp 2.051.629.173,00 atau sebesar 4,18%. Sisa anggaran paling banyak di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten yang merupakan gaji dan tunjangan ASN dan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Grobogan yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada urusan pertanian.

Kinerja program dapat dilihat dari program yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi dengan masing – masing indikator. Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan mempunyai program unggulan dalam mendukung pencapaian misi **"Menguatkan ekonomi**



masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing" sesuai nomenklatur yakni Program Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian serta Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Program ini selaras dengan program yang dikampanyekan oleh Bupati – Wakil Bupati Terpilih yakni Pemberdayaan petani, modernisasi pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian.

Pada urusan pertanian, ada lima program yang dilaksanakan, antara lain Program Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah Persentase pertumbuhan luas penggunaan dan pemanfaatan sarana pertanian. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase pertumbuhan luas penggunaan dan pemanfaatan sarana pertanian sudah tercapai dari target dengan tingkat efisiensi sebesar 13,70%.

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari kegiatan Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian. Indikator Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian adalah Persentase Pertumbuhan pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase Pertumbuhan pengembangan dan pembangunan sudah tercapai dari target dengan tingkat efisiensi sebesar 0,64%.

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian terdiri dari Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. Indikator Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian adalah Persentase bencana pertanian tertangani. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase





bencana pertanian tertangani telah tercapai dari target dengan tingkat efisiensi sebesar 4,44%.

Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari kegiatan Program Penyuluhan Pertanian. Indikator Program Penyuluhan Pertanian adalah Persentase kelompok tani naik kelas. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase kelompok tani telah tercapai dari target dengan tingkat efisiensi sebesar 6,01%.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.





Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

N O	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
	Tujuan :	Pertumbuhan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	100,57	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pertumbuhan luas penggunaan dan pemanfaatan sarana pertanian	108,77	Menunjang
	1. Meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah.			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	100	
	2. Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani	101,21	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	100	Menunjang



N O	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
	Sasaran :	Peningkatan indeks pertanaman (IP)	100,04	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100	Menunjang
	1. Meningkatnya indeks pertanaman (IP)			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase penggunaan benih bersertifikat untuk komoditas utama	100	
	2.Meningkatnya luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan	Luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan	100,11	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan SDG Hewan/Tanaman	100	Menunjang
	3.Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian	Prosentase pertumbuhan kelompok tani naik kelas	100	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian	108%	Menunjang
				Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan pengembangan prasarana pertanian	100	Menunjang





N O	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	100	Menunjang
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100	Menunjang
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100	Menunjang
					Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	100	Menunjang
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	100	Menunjang
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan	100	Menunjang



N O	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjan g/Tidak Menunjan g
				Lainnya	Dipelihara		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	100	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase peningkatan luas lahan yang diasuransikan	102,69	Menunjang
					Prosentase peningkatan luas pengendalian OPT	101,03	Menunjang
					luas lahan yang diasuransikan	95,98	Menunjang
					luas pengendalian OPT	109,75	Menunjang
					Pengendalian Organisme Pengganggu	100	Menunjang



N O	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjan g/Tidak Menunjan g
				Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura,dan Perkebunan	tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan		
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani naik kelas	100	Menunjang
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kenaikan kelas kelompok tani	100	Menunjang
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	Menunjang
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	Menunjang





N O	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjan g/Tidak Menunjan g
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	100	Menunjang
				Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	100	Menunjang
				Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	100	Menunjang
				Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	100	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	Menunjang





N O	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjan g/Tidak Menunjan g
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Menunjang





N O	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjan g/Tidak Menunjan g
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	Menunjang



N O	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjan g/Tidak Menunjan g
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	Menunjang



N O	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	Menunjang
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa	100%	Menunjang

N O	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjan g/Tidak Menunjan g
					penunjang urusan pemerintah daerah		
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100%	Menunjang



N O	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjan g/Tidak Menunjan g
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya dipelihara	100%	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya direhabilitasi/dipeliha ra	100%	Menunjang



Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada Tahun 2025 ini mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari capaian yang berkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal adalah sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan pada awal Tahun 2025.
- b. Perencanaan dari masing –masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai.
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- d. Telah dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang terkait dengan realisasi angaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak fokus kepada hasil.
- e. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media elektronik dan media sosial lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.
- f. Pencapaian target produksi juga didukung oleh 5 program dan 13 kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2025. Kegiatan yang secara langsung mendukung untuk capaian indikator ini antara lain Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Sementara penyebab eksternal yang mendukung keberhasilan pencapaian program / kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan antara lain:

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari stakeholder terkait seperti Kelompok Tani, Gapoktan P3A, GP3A, KWT, pengecer pupuk, produsen benih dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

- 
- b. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Kementerian Pertanian dalam bentuk bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan fasilitasi sarana produksi dan kegiatan yang mendukung pengembangan pertanian di Kabupaten Grobogan. Termasuk kegiatan yang bersumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bidang Pertanian yang fokus pada pemberdayaan kelompok tani dan penyuluh pertanian guna Layanan Operasional BPP, Sekolah Lapang Tematik, Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S dan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian.

Selain terdapat penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja, juga terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai target kinerja untuk beberapa indikator capaian. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

- a. Masih kurangnya sumberdaya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.
- b. Fungsional Penyuluh Pertanian yang memiliki peran sangat besar dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Grobogan menjadi pegawai ASN Kementerian Pertanian RI, sehingga untuk formasi pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan belum banyak yang sesuai dengan Analisa jabatan yang telah ditetapkan.
- c. Agar pemberdayaan petani dan kelompok tani dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilaksanakan rekrutmen penyuluh swadaya yang berasal dari petani yang sukses dalam melakukan kegiatan usaha taninya, sehingga diharapkan dapat menjadi contoh bagi petani di sekitar mereka.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten	17.655.450.000	16.947.029.171	95,99
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.100.000	215.816.300	98,05
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.318.748.000	12.731.117.372	95,59
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.000.000	62.791.000	98,11
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.720.998.600	1.711.043.230	99,42
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170.000.000	162.717.000	95,72
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.211.000.000	1.124.833.150	92,88
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	950.603.400	938.711.119	98,75
II.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.481.620.000	4.730.535.653	86,30
1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana	4.826.620.000	4.081.014.733	84,55



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Pertanian			
2	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	655.000.000	649.520.920	99,16
III.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17.133.661.500	17.023.781.739	99,36
1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	834.996.000	818.733.100	98,05
2	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	16.298.665.500	16.205.048.639	99,43
IV.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	2.847.639.500	2.721.216.515	95,56
1	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	2.847.639.500	2.721.216.515	95,56
V.	Program Penyuluhan Pertanian	5.917.513.000	5.561.691.749	93,99
1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	5.917.513.000	5.561.691.749	93,99
JUMLAH		49.035.884.000	46.984.254.827	95,82

BAB IV

PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.49.035.884.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 46.984.254.827,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 95,82%, dan nilai efisiensi anggaran sebesar 4,18%.



B. Saran

Secara ringkas capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja pada tahun 2025 dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi peningkatan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 dengan berbagai upaya perbaikan yang dilakukan secara optimal dari berbagai pihak terutama Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dapat dikatakan cukup baik. Selain itu, agar dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah di capai, diharapkan adanya kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, diantaranya perlu dilakukan hal – hal sebagai berikut:

1. Perbaikan perencanaan program dan kegiatan dan estimasi penggunaan anggaran yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.
2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi teknis baik internal maupun dengan instansi terkait atau lintas sektoral dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan. Dengan koordinasi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya.
3. Perlu diusahakan sarana dan prasarana pelaksanaan program dan kegiatan guna menunjang operasional kegiatan.
4. Perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara kontinyu untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya. Dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak menemui kendala dan masih terdapat banyak kekurangan, namun demikian diharapkan LKjIP ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja dalam pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sesuai Rencana Strategis Tahun



2021 – 2026 dalam upaya mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan.

5. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penanaman bibit serta kegiatan pembangunan fisik di lapangan kadang masih terkendala karena perubahan musim yang tidak pasti maka dalam menjadwalkan kegiatan di lapangan harus lebih cermat.
6. Perlu adanya survey lokasi secara spesifik sehingga tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Lokasi kegiatan di lapangan biasanya menyebar sehingga diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
8. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bangunan fisik selama ini masih kurang mampu dalam teknis konstruksi, maka untuk pelaksanaan kegiatan diperlukan adanya konsultan perencanaan dan konsultan pengawas kegiatan.
9. Banyaknya pengajuan proposal yang berkaitan dengan infrastruktur pertanian maka diperlukan penyebaran dan pentahapan lokasi pelaksanaannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.